

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

005.01.099232

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 17A Muara Enim
Email :pengadilannegerimuaraenim@gmail.com
Telpon/Fax : (0734)421194



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 17A Muara Enim
Email : pengadilannegerimuaraenim@gmail.com
Telpon/Fax : (0734)421194

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Muara Eni adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Muara Eni mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Muara Eni. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Muara Eni, 31 Desember 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,

Setretaris,



SYAHJILLAH, SE, MM
NIP.19780305201101100

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
A.1. Dasar Hukum	10
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Muara Enim	12
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
A.4. Basis Akuntansi	13
A.5. Dasar Pengukuran	13
A.6. Kebijakan Akutansi	26
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	21
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	21
B.2. Belanja	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
C.1. Aset Lancar	28
C.2. Aset Tetap	31
C.4.2 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	36
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	37
C.6. Beban yang Masih Harus Dibayar	38

C.7. Ekuitas	39
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	39
D.2. Beban Pegawai	39
D.3. Beban Persediaan.....	40
D.4. Beban Barang dan Jasa	41
D.5. Beban Pemeliharaan	42
D.6. Beban Perjalanan Dinas.....	43
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	43
D.8. Beban Bantuan Sosial	44
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	45
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	46
D.11. Beban Lain-lain	46
D.12. Kegiatan Non Operasional	47
D.13. Pos Luar Biasa.....	48
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	48
E.1. Ekuitas Awal	48
E.2. Surplus (defisit) LO	48
E.3. 10. Penyesuaian Nilai Aset.....	48
E.3. 2 Koreksi Nilai Persediaan	49
E.3. 3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	49
E.3. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	49
E.4. 5 Koreksi Lain-lain	50
E.5. Transaksi Antar Entitas	50
E.6. Ekuitas Akhir	52
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	52
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	52
F.2. Pengungkapan Lain-lain.....	53
Daftar dan Lampiran.....	54
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	55

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Muara Enim

Jalan Jend Ahmad Yani No 17A Muara Enim

Telp/ Fax (0341) 421194 e-mail : pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Muara Enim yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas. dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir. adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Muara Enim telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Muara Enim, 31 Desember 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,


SYAFULLAH, SE, MM
NIP.197803052011011006

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan Belanja selama periode 1 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023..

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 25,891,500 atau mencapai 62 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.41,772,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp.331,269,370. atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.332,000,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2023

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.300.000 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 300.000; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.300.000

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa.

pos luar biasa. dan surplus(defisit) -LO. yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 337,566,662 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (311,675,162) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan surplus(defisit) sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (311,675,162)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp.80,000 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (311,675,162) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 311,895,162 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.300,000

4.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas. yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2023, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN TAHUN 2022
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2023			TA 2022
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1	41,772,000	25,891,500	62	39,777,500
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	41,772,000	25,891,500	62	39,777,500
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah			41,772,000	25,891,500	62	39,777,500
B	Belanja Negara	B.2	0	0	0	0
1.	Belanja Pegawai	2.1.	0	0	0	0
2.	Belanja Barang	2.2.	332,000,000	331,269,370	100	329,409,880
3.	Belanja Modal	3.2.3.	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara			332,000,000	331,269,370	100	329,409,880

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
NERACA
PER 31 Desember 2023 DAN TAHUN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	2022
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	0	0
Jumlah Aset Lancar		300,000	80,000
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.		
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 5.	0	0
Jumlah Aset Tetap			
Aset Lainnya	C.4	0	0
Aset Lain-Lain	C.4. 1.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 2.	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		300,000	80,000
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		

Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5. 2.	0	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 3.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas		300,000	80,000
Jumlah Ekuitas		300,000	80,000
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		300,000	80,000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2023 DAN TAHUN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2023	TA 2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	41,772,000	42,738,000
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		25,891,500	39,777,500
Jumlah Pendapatan		25,891,500	39,777,500
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	95,501,542	142,950,879
Beban Barang dan Jasa	D. 4	172,727,120	111,806,920
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	254,400
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	69,238,000	82,750,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		337,566,662	337,762,199
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(311,675,162)	(297,984,699)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 12	0	0
Beban dari Kegiatan non operasional lainnya	D. 13	0	0
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(311,675,162)	(297,984,699)
Pos Luar Biasa	D. 14	0	0
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		69,238,000	82,750,000
Beban Persediaan		95,501,542	142,950,879
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(311,675,162)	(297,984,699)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2023 DAN TAHUN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023	2022
Ekuitas Awal	E. 1	80,000	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(311,675,162)	(297,984,699)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	E. 3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	311,895,162	298,064,699
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 5	220,000	80,000
Ekuitas Akhir	E. 6	300,000	80,000

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. **Profil dan Kebijakan Teknis PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

Visi Pengadilan Negeri Muara Enim Yaitu:

" Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim Yang Agung "

Misi Pengadilan Negeri Muara Enim adalah :

1. Menjaga kemandirian **Pengadilan Negeri Muara Enim**
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di **Pengadilan Negeri Muara Enim**
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di **Pengadilan Negeri Muara Enim**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kinerja Sumber Daya Aparatur Pengadilan Negeri Muara Enim.

hal-hal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan ini adalah :

- Meningkatkan kualitas putusan hakim
- Mempercepat penyelesaian perkara

- Menguasai Standar Operation Procedure (SOP) sesuai bidang masing-masing
 - Pengawasan yang berkualitas
 - Menerapkan reward dan punishment untuk mengontrol kinerja
 - Dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. hal-hal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan ini adalah :
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
 - Meningkatkan sarana. prasarana. dan teknologi informasi untuk pelayananan Publik
 - Mengembangkan sistem informasi perkara

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

b. Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi. yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

c. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.310.000 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, dilakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang

Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan irigasi berupa jalan dan jembatan dan bangunan air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2020 dan 2022. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada laporan keuangan
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan aset ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/ KM.6/ 2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	5
Franchise	10
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	20
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	25
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	70
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga. Belanja yang Masih Harus Dibayar. Pendapatan Diterima di Muka. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang. dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan. Pengadilan Negeri Muara Enim telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan anggaran belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
PENDAPATAN		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	41,772,000	41,772,000
Jumlah Pendapatan	41,772,000	41,772,000
BELANJA		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	332,000,000	332,000,000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	332,000,000	332,000,000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

**Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp.0**

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 41,772,000 atau mencapai persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 62. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Muara Enim adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	41,772,000	25,891,500	62
2.	Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
4.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan pemerintah	0	0	0
5.	Pendapatan dari dari pemindahtanganan BMN lainnya	0	0	0
Total Pendapatan		0	0	0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 0atau persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena:

1. Pada tahun 2023 ada peningkatan pendapatan sewa tanah. gedung dan bangunan. karena adanya perhitungan ulang harga sewa rumah dinas .
2. Pada periode ini tidak ada pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya. tetapi ada penurunan pendapatan denda karena keterlamabatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPN per 31 Desember 2023 dan Tahun 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	2022	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	41,772,000	42,738,000	(15,880,500)	62
2.	Penerimaan kembali belanja modal TAYL	0	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
4.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan pemerintah	0	0	0	0
5.	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	0	0	0	0
6.	Pendapatan dari pemindahtanganan lainnya	0	0	0	0
Total Pendapatan					

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
:
Rp.158,896,620*

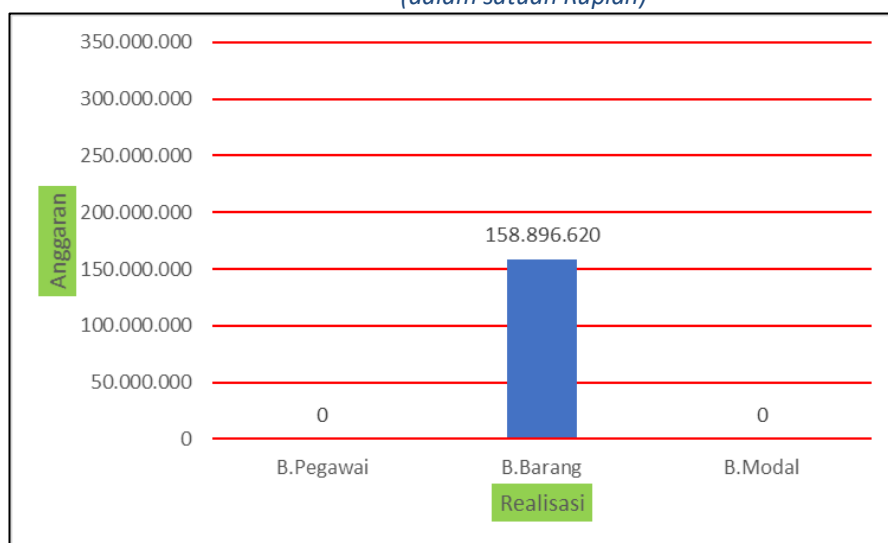
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Muara Enim per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0 setelah dikurangi pengembalian belanja. atau sebesar dari anggaran senilai Rp. 0. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Ri0ncian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	332,000,000	331,269,370	100
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2023

Realisasi Belanja Negara mengalami Penurunan sebesar Rp. 27,442,720 atau sebesar 7,94 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena:

1. Kenaikan pagu belanja barang dibandingkan dengan tahun anggaran yang lalu yang

berbanding terbalik dengan kenaikan realisasi anggaran.

Perbandingan realisasi belanja TA 2022 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dan Tahun 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2023	TA 2022	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	332,000,000	331,269,370	(730,630)	(1,790,120)
Belanja Modal	0	0	0	0
Total Belanja	332,000,000	331,269,370	(730,630)	(1,790,120)

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai :
Rp.0*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1,273,491,320	1,457,015,040	0	
Belanja Pembulatan Gaji PNS	18,987	23,536	0	
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	91,705,524	102,503,904	0	

Belanja Tunj. Anak PNS	27,221,952	33,732,234	0
Belanja Tunj. Struktural PNS	36,400,000	31,090,000	0
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,199,780,000	1,206,330,000	0
Belanja Tunj. PPh PNS	125,433,275	109,524,614	0
Belanja Tunj. Beras PNS	75,244,380	90,742,260	0
Belanja Uang Makan PNS	243,609,000	259,257,000	0
Belanja Tunjangan Umum PNS	15,215,000	15,970,000	0
Total Belanja Brutto	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0

B.2.2. Belanja Barang

**Realisasi
Belanja
Barang :**
Rp.332,000,00
0

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Muara Enimper 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp.331,269,370.dan Rp. 329,409,880Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya monitoring terhadap penyesuaian rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran setiap bulan

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember Tahun 2023 dan Tahun 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Barang Operasional	0	0	0	0
Belanja Barang Non Operasional	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B.2.3. Belanja Modal

**Realisasi
Belanja
Modal :Rp. 0**

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Muara Enim per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	0	0	0
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	0
Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B. 2.3.1 Belanja Modal. Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp.0. Sama dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp. 0. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 .

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
			Rp.	%
	0	0	0	0
Total Belanja	0	0	0	0

B. 2.3.2 Belanja Modal. Gedung dan Bangunan.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar R

Uraian	TA 2022	TA 2020	Perubahan	
			Rp.	%
	0	0	0	0
Total Belanja	0	0	0	0

n Rp0.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset
Lancar:
Rp.835,635
860

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 300,000 dan Rp. 80,000.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

pelaporan.

Rincian Aset Lancar Pada Pengadilan Negeri Muara Enim per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Persediaan	0	0
Total Aset Lancar	300,000	80,000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

**Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp.
18,000,000**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2023	TA2022
1	Kwitansi yang belum dipertanggungjawabkan	0	0
2	Uang tunai pada brangkas Bendahara	0	0
3	Uang direkening bank	0	0

Jumlah	0	0
---------------	----------	----------

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

**Kas
Lainnya
dan Setara
Kas: Rp. 0**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.3. Persediaan

**Persediaan
: Rp. 5,000**

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	TA 2022	TA 2023
1	Barang Konsumsi	0	0
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
3	Persediaan lainnya	0	0
Total		0	0

Rincian persediaan masuk dan keluar dijelaskan sebagai berikut :

Saldo awal : 0

Pembelian : 0

Pemakaian : 0

Aset Tetap : Rp.0 Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	TA 2022	31 Desember 2023	Perubahan
		0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	0	0	0
	Nilai Buku Aset Tetap	0	0	0

Tanah: Rp.0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

Rincian Saldo Tanah

No	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
.						0
					0	
Jumlah						0

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

**Peralatan
dan Mesin :
Rp. 0**

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
Pembelian	0
Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap	0
Pengembangan nilai aset	0
Mutasi Kurang	0
Penghentian aset dari penggunaan	0
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	0

Realisasi belanja modal dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada tahun 2023 sebesar Rp.0

C.2.3. Gedung dan Bangunan

**Gedung dan
Bangunan :
Rp.0**

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
Koreksi nilai tim penertiban aset	0
Mutasi Kurang	0
Koreksi semu hasil penilaian kembali	0
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	0

Pada akhir periode 31 Desember 2023 nilai aset gedung dan bangunan tidak mengalami perubahan .

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan . Irigasi. dan Jaringan

**Aset Jalan .
Irigasi. dan
Jaringan :
Rp. 0**

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan. Irigasi. dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan. Irigasi. dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
	0
Mutasi Kurang	0
	0
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	0

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

**Aset Tetap
Lainnya: Rp.
0**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Pada tahun 2023 nilai Aset tetap lainnya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun anggaran 2022.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	0
Transfer Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
Nilai Buku 31 Desember 2023	0

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

**Konstruksi
dalam
Pengerjaan
: Rp. 0**

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

**Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap :
Rp. 0**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah. sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
.				
Jumlah				

C.2.8. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.0 dan Rp0 .Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023

0

Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d31 Desember 2023	0
Nilai Buku31 Desember 2023	0

C.4.1. Aset Lain-lain

**Aset Lain-lain :
Rp. 0**

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Muara Enim serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi Tambah	0
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
	0
Mutasi Kurang	0
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	0
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	0
Saldo per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Penyusutan s.d31 Desember 2023	0
Nilai Buku31 Desember 2023	0

Pada periode 31 Desember 2023 jumlah aset lain-lain Rp.0 yang disebabkan karena barang tersebut sudah dilakukan penghapusan sesuai dengan berita acara lelang dari KPKNL .

C.4.2 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp. 0 dan 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Aset tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Nilai perolehan Aset Lainnya			0
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			0
Nilai buku Aset Lainnya			0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

**Rp.
854,611,110**

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Muara Enim per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	2022
Utang Kepada Pihak Ketiga	0	0
Utang yang belum ditagihkan	0	0
Uang Muka dari KPPN	0	0

Jumlah	0	0
--------	---	---

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga:	Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).
Rp. 817,630,860	

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN:	Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.
Rp. 18,000,000	

Beban yang Masih Harus Dibayar:	C.6. Beban yang Masih Harus Dibayar
Rp. 854,611,110	Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	TA 2022
Utang kepada pihak ketiga	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	0	0
Uang Muka dari KPPN	0	0
Jumlah	0	0

C.7. Ekuitas

Ekuitas: Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 300,000 dan Rp. 80,000. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2023 TA 2020 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	0	0	0
2.	Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	0	0	0
3.	Pendapatan pemindahtanganan BMN lainnya	0	0	0
Total Pendapatan		0	0	0

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan

oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Beban Gaji Pokok PNS	1,273,491,320	1,457,015,040
Beban Pembulatan Gaji PNS	18,901	22,584
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	91,705,524	102,503,904
Beban Tunj. Anak PNS	27,221,952	33,732,234
Beban Tunj. Struktural PNS	36,400,000	31,090,000
Beban Tunj. Fungsional PNS	1,199,780,000	1,206,330,000
Beban Tunj. PPh PNS	125,433,275	109,524,614
Beban Tunj. Beras PNS	75,244,380	90,742,260
Beban Uang Makan PNS	243,609,000	259,257,000
Beban Tunjangan Umum PNS	15,215,000	15,970,000
Total Beban Pegawai	0	0

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp. 77,060,042

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	95,501,542	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	95,501,542	0	0	0

D.4. Beban Barang dan Jasa

**Beban
Barang
dan Jasa :
Rp.
71,469,120**

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	0	0	0	0
Beban Langganan Listrik	0	0	0	0
Beban Langganan Telepon	0	0	0	0
Beban Langganan Air	0	0	0	0
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
Beban Bahan	0	0	0	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	0	0
Beban sewa	0	0	0	0

Beban Barang	0	0	0	0
Operasional Lainnya				
Beban barang	0	0	0	0
operasioanl penanganan pandemi covid				
Beban barang non operasional lainnya	0	0	0	0
Total Beban Barang Jasa	0	0	0	0

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp. 0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban pemeliharaan jaringan	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

**Beban
Perjalanan
Dinas :**
Rp.
35,940,00
0

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 69,238,000 dan Rp. 0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa				
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	69,238,000	82,750,000	(13,512,000)	(16.329)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Pengembalian beban perjalanan biasa	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	69,238,000	82,750,000	(13,512,000)	(16.329)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

**Beban
Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
: Rp. 0**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
--------	---------	---------	-------------	---

Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

**Beban
Penyusutan
dan
Amortisasi:
Rp. 0**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0

Jumlah Amortisasi				
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
--------	---------	---------	-------------	---

Beban Aset	0	0	0	0
Extrakomptabel				
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset	0	0	0	0
Extrakomptabel Gedung dan Bangunan				
Beban Aset	0	0	0	0
Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional : Rp.0 Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Beban pelepasan aset non lancar	0	0	0	0
Surplus /defisit dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0	0
Beban dari kegiatan non operasional	0	0	0	0

lainnya

Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0
--	---	---	---	---

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi. tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	41,772,000	42,738,000	(15,880,500)	62
Beban Perjalanan Dinas	69,238,000	82,750,000	(13,512,000)	(16.329)
Beban Persediaan	95,601,542	142,950,879	(47,349,337)	(33.123)
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. (311,675,162) dan Rp(297,984,699). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

E.3. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan

2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 Dan Rp.0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan	0
Lainnya	
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Selisih revaluasi ini merupakan revaluasi BMN/ penilaian kembali tanah dan gedung bangunan kantor dan rumah dinas Pengadilan Negeri Muara Enim oleh KPKNL Lahat

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Aset tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Software	0
Jumlah	0

E.4.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. koreksi ini merupakan koreksi atas beban langganan daya jasa dan speedy atas pemakaian bulan Desember 2023 yang belum diakrualkan pada pada laporan akhir tahun 2022. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Transaksi antar Entitas terdiri dari :

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	300,000
Ditagihkan ke Entitas Lain	0
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	300,000

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/ Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023. DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 0.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL. antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terdapat transfer masuk dari Pengadilan Tinggi Palembang ke Pengadilan Negeri Muara Enim sebesar Rp.6.517.292 terdiri dari:

Uraian	Jumlah
Buku register	6.517.292
Jumlah	6.517.292

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp.0

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
Jumlah		0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2023 disajikan pada lampiran.

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.(18,975,250) dan Rp. 10,644,000

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK untuk semester 1 tahun 2023

F.2.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Muara Enim yaitu BRI Cabang Muara Enim dengan nomor rekening 65320989911000 a.n Bpg 014 Pengadilan Negeri Muara Enim 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.

Sesuai dengan PMK No. 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Pemerintah bahwa rekening yang aktif tersebut telah mendapat persetujuan ulang dari KPPN Lahat.

F.2.3. Revisi DIPA

Revisi ke-1 tanggal 09 Februari 2023 revisi terkait halaman III DIPA.

Revisi ke-2 tanggal 05 April 2023 revisi terkait halaman III DIPA.

Revisi ke-3 tanggal 11 Juli 2023 revisi terkait halaman III DIPA.

F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada Ralat SPM

F.2.5. Catatan Penting Lainnya

Sampai periode 31 Desember tahun anggaran 2023. Pengadilan Negeri Muara Enim mengalami perubahan pejabat pengelola keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim nomor : W6.U6/76/KP.04.5/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 penunjukkan PPK (Pejabat pembuat Komitmen). PPSPM (Pejabat dan Penandatangan Surat Perintah Membayar. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Staff pengelola Keuangan.. Nama-nama pejabat pengelola keuangan Pengadilan Negeri Muara Enim dapat dijabarkan sebagai berikut: :

Kuasa Pengguna Anggaran : Syaifullah, SE.,MM

Pejabat Pembuat Komitmen : Syaifullah, SE.,MM

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Kms. Muhammad Amin, SH.,MM

PPABP : Kms. Muhammad Amin, SH

Staff Pengelola Keuangan : Heriyanto, SH

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim no. W6.U6/76/KP.04.5/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 menunjuk bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. antara lain :

Bendahara Pengeluaran : Heriyanto, SH

Bendahar Penerimaan : Iwan Fajri, A.Md

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal W6.U6/76/KP.04.5/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 menunjuk operator SAIBA dan SIMAK pada satker Pengadilan Negeri Muara Enim dan koordinator Wilayah Sumatera Selatan. yaitu :

Operator SAIBA DAN SAIBA-W : Yurika Ariani, ST.,MM

Operator SIMAK DAN SIMAK-W : Ester Meriyanti Sinaga, SE.,MM

A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN. AKUMULASI PENYUSUTAN. DAN NILAI BUKU ASET TETAP

DAFTAR HIBAH LANGSUNG

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Daftar Hibah Langsung Berupa Barang

Per 31 Desember 2023

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan
						Nilai
						Ket.
1.						
2.						
		Jumlah				

LAMPIRAN II

TABEL KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

NO	SATKER	KDP	NO KONTRAK	NILAI KONTRAK	% PENYELESAIAN	NILAI KDP	SUMBE R DANA
1							
2							
3		N	I	H	I	L	
4							
5							
6							

DRAFT